



KATALOG BPS : 9207.32

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2010



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
BAB II. METODOLOGI	6
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8
2.1.1. Konsep dan Definisi	8
2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	8
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	13
2.2.1. Konsep dan Definisi	13
2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	13
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	14
2.3.1. Konsep dan Definisi.....	14
2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	15
2.4.1. Konsep dan Definisi.....	15
2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	16
2.5. Perubahan Stok.....	16
2.6. Ekspor dan Impor.....	17
2.6.1. Konsep dan Definisi.....	17
2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	18

BAB III.	TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN	19
3.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	23
3.2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	27
3.3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	28
3.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30
3.5.	Inventori.....	35
3.6.	Ekspor dan Impor.....	36
3.7.	Sumber Laju Pertumbuhan (<i>Source of Growth/SOG</i>)	41
3.8.	Kesimpulan	44

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Jawa Barat menurut Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2010 (jutaan rupiah)	21
Tabel 2.	PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB dan <i>Source of Growth</i> PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010.....	28
Tabel 3.	Laju dan Peranan Inventori Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2008-2010..	31
Tabel 4.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2010.....	42

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2008-2010.....	22
Grafik 2.	PDRB Penggunaan Jawa Barat Tahun 2010 Menurut Komponen.....	23
Grafik 3.	Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditi Tahun 2010.....	24
Grafik 4.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga Tahun 2010.....	25
Grafik 5.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2010.....	26
Grafik 6.	Grafik Nilai Konsumsi LNPRT dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2010.....	27
Grafik 7.	Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Tahun 2010.....	29
Grafik 8.	PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2008-2010.....	32
Grafik 9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010 (Persen).....	33
Grafik 10.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010.....	34
Grafik 11.	Laju Pertumbuhan Ekspor Impor Jawa Barat Tahun 2008-2010 (Persen)....	37
Grafik 12.	Perkembangan Peranan Ekspor Impor Jawa Barat Tahun 2008-2010.....	38
Grafik 13.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Jawa Barat pada Tiga Besar Negara Tujuan Tahun 2008-2010.....	39
Grafik 14.	Peranan Empat Komoditas Unggulan Ekspor Non Migas Jawa Barat Tahun 2008-2010 (Persen).....	40
Grafik 15.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2010.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah).....	46
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah).	47
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Persen).....	48
Lampiran 4.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Persen).....	49
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Persen).....	50
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Persen).....	51
Lampiran 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Tahun 2000 = 100,00) (Persen).....	52
Lampiran 8.	Inflasi Tahun 2008-2010 (Persen).....	53
Lampiran 9.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2010 (jutaan rupiah).....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap yang dibarengi dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth*) ke arah pembanguan yang terpusat pada manusia telah menyebabkan perubahan pola evaluasi pembangunan baik nasional maupun regional. Era pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) mensyaratkan evaluasi pembangunan yang lebih diarahkan pada tingkat ketersentuhan program-program yang telah direalisasikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah bersangkutan.

Berbagai teori mengungkapkan bahwa kata kunci dalam peningkatan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah adalah peningkatan keterjangkauan (*accessibility*) masyarakat terhadap seluruh fasilitas, baik kesehatan, pendidikan maupun kegiatan ekonomi, dan peningkatan respons masyarakat terhadap fasilitas yang ada di wilayah bersangkutan. *Accesibility* sangat berkaitan dengan infrastruktur, ketersediaan serta penyebaran fasilitas (pendidikan, kesehatan dan penunjang

perekonomian) yang ada di suatu wilayah. Sedangkan tingkat respons masyarakat terhadap fasilitas sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Walaupun suatu wilayah memiliki tingkat keterjangkauan terhadap fasilitas yang tinggi tanpa didukung oleh respons masyarakat, maka pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut cenderung tidak akan menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan manusia yang optimal di wilayah bersangkutan. Dengan demikian, daya beli masyarakat juga merupakan hal yang sangat vital dalam mendorong kinerja pembangunan manusia melalui peningkatan responsibilitas masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Upaya-upaya yang mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah meningkatkan kinerja perekonomian wilayah dengan mengarahkan kebijakan-kebijakan pada pemberdayaan sumber daya domestik, sehingga hasil-hasil pembangunan, khususnya di bidang ekonomi terasa di seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi dititik beratkan pada pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Redistribution with growth*). Dengan demikian, penentuan fokus dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Untuk mendukung tujuan utama pembangunan, penentuan fokus tersebut haruslah mempertimbangkan dua hal penting, yaitu pengembangan sektor-sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan efektifitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (LPE).

Produksi barang/jasa di suatu wilayah merupakan respon dari adanya permintaan akan barang/jasa tersebut di wilayah bersangkutan. Secara makro, permintaan barang/jasa merupakan gambaran dari berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan input pada proses produksi barang/jasa lainnya, kebutuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta kebutuhan yang berasal dari

wilayah lainnya (ekspor). Dalam suatu sistem perekonomian terbuka, pemenuhan permintaan barang/jasa tersebut tidak selalu disuplai dari produk domestik, namun produk dari luar wilayah (impor) juga ikut memberikan kontribusi. Dengan demikian, struktur permintaan (*demand*) dapat merefleksikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Tentunya, untuk efektifitas jalannya pembangunan, perlakuan/intervensi yang dilakukan akan sangat berbeda untuk wilayah dengan sumber pertumbuhan berbeda. Dengan kata lain, akan jauh lebih efektif kebijakan peningkatan produksi (*supply push*) yang dilakukan melalui strategi tarikan permintaan (*demand pull*). Kebijakan yang hanya memprioritaskan peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan sisi permintaan akan menyebabkan penurunan tingkat harga, khususnya di tingkat produsen sehingga berdampak pada kelesuan dan akhirnya bermuara pada melemahnya kembali kinerja yang telah dibangun.

Dari uraian di atas, maka untuk mencapai efektifitas program-program dalam menstimulus LPE, tentunya tidak hanya dibutuhkan data tentang struktur produksi barang/jasa per sektor ekonomi (digambarkan oleh data PDRB menurut lapangan usaha), namun juga informasi tentang struktur penggunaan barang/jasa yang merefleksikan struktur permintaan di suatu wilayah (digambarkan oleh data PDRB menurut penggunaan).

Pendekatan yang akan disajikan dalam publikasi ini adalah penghitungan PDRB menurut penggunaan. Data agregat yang dapat diukur dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan adalah konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori dan net ekspor. Konsumsi akhir menggambarkan pendapatan masyarakat/institusi yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi produk domestik yang dihasilkan, pembentukan modal merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan, perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi

barang inventori yang bermakna pertambahan atau pengurangan, selanjutnya net ekspor adalah selisih antara angka ekspor dengan impor, baik antar negara maupun antar provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Salah satu indikator makro yang kerap digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penghitungannya PDRB, ada tiga macam pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan produksi, penggunaan dan pendapatan. PDRB menurut pendekatan produksi mengukur tingkat produktivitas suatu wilayah, sedangkan PDRB menurut penggunaan mengukur bagian produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor. Selanjutnya, PDRB menurut pendapatan mengukur balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Indikator-indikator yang dapat diturunkan dari data PDRB yang sering digunakan untuk menganalisis perekonomian dalam menentukan arah kebijakan serta mengevaluasi hasil pembangunan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Di sisi lain, berdasarkan uraian sebelumnya, maka indikator ekonomi perlu juga dianalisis dari sisi permintaan (*demand*). Data yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran indikator ekonomi dari sisi *demand* tersebut adalah PDRB yang dihitung menurut penggunaan.

Secara garis besar, maksud dan tujuan penulisan publikasi ini adalah meningkatkan ketersediaan data indikator makro ekonomi dari sisi permintaan. Ketersediaan data tersebut adalah usaha untuk mendukung pencapaian visi dan misi

pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat membutuhkan gambaran tentang ukuran kinerja pembangunan dan penetapan strategi-strategi yang akan dilakukan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Data PDRB Penggunaan Jawa Barat merupakan potret kinerja pembangunan ekonomi makro Jawa Barat yang dilihat dari sisi permintaan yang terdiri dari komponen Konsumsi, Investasi dan Ekspor-Impor. Selain itu, PDRB menurut penggunaan juga dapat digunakan untuk melihat sumber-sumber pertumbuhan di wilayah Jawa Barat yang diharapkan menjadi pijakan kuat untuk alat perencanaan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data pada umumnya.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

PDRB menurut penggunaan (*expenditure*) merupakan gambaran penggunaan barang/jasa yang diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Struktur penggunaan produk barang dan jasa secara makro merupakan refleksi dari permintaan (*demand*) suatu wilayah terhadap produk barang/jasa. Secara umum, permintaan barang/jasa terbagi dalam dua bagian besar yaitu Permintaan Antara (*Intermediate Output*) dan Permintaan Akhir (*Final Demand*). Permintaan antara adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan/proses produksi pada unit usaha lainnya. Sedangkan permintaan akhir adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir untuk rumahtangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPRT) dan pemerintah; kebutuhan investasi untuk unit usaha; dan kebutuhan luar wilayah (ekspor) .

Berdasarkan teori keseimbangan, dengan adanya produksi (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka terjadi proses transaksi ekonomi. Dari sisi produsen transaksi tersebut menciptakan pendapatan, sedangkan dari sisi konsumen menimbulkan pengeluaran. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

**PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR
DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR**

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang/jasa (untuk kebutuhan konsumsi rumahtangga dan LNPRT, konsumsi pemerintah, barang modal, perubahan persediaan, seluruh barang/jasa yang diekspor) yang disuplai dalam

suatu perekonomian. Nilai pengeluaran akhir tersebut akan melebihi output yang diproduksi unit kegiatan ekonomi domestik dengan nilai sebesar nilai total impor barang dan jasa. Sehingga nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

C_h : Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)

C_n : Konsumsi Lembaga Non Profit (*Non Profit Institution*)

C_g : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)

I_i : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investment*)

I_s : Perubahan Stok (*Capital Stock*)

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB.

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \quad \dots\dots\dots (2)$$

di mana :

C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Pemerintah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil dan barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Di samping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

- 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Jawa Barat. Di samping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya.
- 2). Makanan dan minuman jadi.

3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau.

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- a). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan.
- b). Aneka barang dan jasa.
- c). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- d). Pajak dan asuransi.
- e). Keperluan untuk pesta dan upacara.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada.

a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas.

Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{n+1} = C_n + (C_n \cdot dp \cdot b)$$

di mana :

C_{n+1} : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-($n+1$)

C_n : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp : Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke- n dengan tahun ke-($n+1$)

b : Koefisien elastisitas.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda *revaluasi* artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Artinya, setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut :

$$Q_i = a + (b \cdot Y_i)$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi.

Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Bentuk LNP yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Kemasyarakatan,
2. Organisasi Sosial,
3. Organisasi Profesi,
4. Perkumpulan Sosial / Kebudayaan / Olah raga dan Hobi,
5. Lembaga Swadaya Masyarakat,
6. Lembaga Keagamaan,
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan / Beasiswa.

2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penyusunan perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya.

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing subsektornya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode deflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu.

Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tidak dapat diperoleh secara langsung karena produksi sektor ini tidak dijual. Oleh karena itu untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan konsumsi pemerintah menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

Selain itu digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- 1). *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2). *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer.
- b). Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.

- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan.
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong.

2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Di samping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau *Commodity Flow*.

Pembentukan modal tetap menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu :

- 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- 2). Pertambangan dan Penggalian,
- 3). Industri Pengolahan,
- 4). Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5). Bangunan,
- 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7). Pengangkutan dan Komunikasi,
- 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
- 9). Jasa-jasa.

2.5. Perubahan Stok

Data mengenai nilai perubahan stok dalam komponen PDRB masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari selisih PDRB dengan komponen

permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor neto. Dengan demikian, didalamnya masih terkandung selisih statistik (*Statistical Discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

2.6.1. Konsep dan Definisi

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB.

Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung.

Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b. (free on board)*, sedangkan impor barang dinilai dengan harga *c.i.f. (cost, insurance and freight)*. Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut.

2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Data ekspor dan impor Jawa Barat masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/Provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai.

Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/Provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku.

Ekspor dan impor antar negara merupakan ekspor impor antar negara menurut pelabuhan di Jawa Barat, sedangkan ekspor impor antar pulau/Provinsi menggunakan ratio Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor impor atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

BAB III TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN

Arus globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dibendung penyebarannya sehingga cepat lambat akan memberikan berbagai efek baik positif maupun negatif terhadap berbagai aspek pembangunan bernegara. Efek positif globalisasi yang dapat dirasakan terutama dalam pembangunan perekonomian adalah dengan berkembangnya industrialisasi, perdagangan internasional, investasi, riset dan pengembangan teknologi informasi yang pada gilirannya mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Dalam perdagangan internasional efek tersebut dapat dirasakan dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan yang telah dimulai kurang lebih tiga dekade silam atau awal tahun 80-an. Kebijakan pemerintah dengan membuka keran impor bahkan untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak patut mendapatkan perhatian. Hal tersebut harus disikapi oleh pemerintah dengan menyiapkan berbagai perangkat deregulasi dan strategi perdagangan yang memadai, karena jika tidak, liberalisasi perdagangan hanya akan menjadi bumerang bagi para pelaku perekonomian bangsa.

Sementara itu ditinjau secara makro, efek negatif dari arus globalisasi yang dirasakan fatal adalah adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 lalu, dimana saat itu pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi tahunan membumbung tinggi hingga terjadi *double digit inflation* dan pada level nasional mencapai angka diatas 50 persen.

Menurut Basri dan Munandar (2009), tidak seperti negara-negara lain yang terhantam krisis yang pemulihannya relatif cepat, saat itu fundamental dan struktur ekonomi Indonesia sangat lemah, hal ini menyebabkan ketika Indonesia terhantam badai krisis sulit untuk bangkit kembali. Pada saat krisis global kembali terjadi tahun 2008, yang dimulai di Amerika Serikat pengaruhnya juga sangat terasa dalam perekonomian nasional dengan menurunnya nilai tukar rupiah dan berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, namun saat itu krisis hanya terjadi pada sektor finansial dan tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan seperti pada krisis yang lalu serta struktur ekonomi Indonesia relatif lebih kuat sehingga upaya pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat.

Basri dan Munandar (2009) mengidentifikasi bahwa pasca krisis ekonomi terdapat empat perubahan mendasar yang berkaitan dan berpotensi menjadi beban dalam perekonomian nasional, meski demikian dalam publikasi ini yang akan mendapatkan titik berat hanya dua perubahan yang berhubungan langsung dengan perekonomian dari sisi penggunaan yaitu kemerosotan tingkat investasi riil/langsung dan penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian karena menstimulasi dan berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan produksi pada gilirannya dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan sarana fisik, infrastruktur dan lain-lain. Penurunan investasi riil/langsung atau *direct investment*, baik penanaman modal yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), pada akhirnya akan menggiring pada kelesuan perekonomian karena investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan utama dalam perekonomian.

Tabel 1.
PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2008-2010 (jutaan rupiah)

Uraian	2008	2009^{*)}	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran KRT	391.682.855,88	427.641.859,65	465.383.669,48
a. Makanan	213.577.113,97	231.172.548,62	249.728.584,80
b. Non Makanan	178.105.741,91	196.469.311,04	215.655.084,68
2. Konsumsi LNP	2.891.650,29	5.055.740,39	3.385.128,51
3. Konsumsi Pemerintah	46.487.316,51	58.172.553,50	66.516.281,58
4. PMTB	106.105.180,73	116.396.431,43	136.629.046,85
5. Inventori	20.359.959,66	25.692.478,21	30.343.120,03
Diskrepansi	28.383.975,70	8.929.474,51	10.017.282,06
6. Ekspor	257.815.103,24	245.218.479,81	278.076.250,41
a. Antar Negara	186.636.120,21	188.561.917,50	215.565.319,01
b. Antar Provinsi	56.407.025,56	42.394.446,32	47.697.569,45
c. Jasa	14.771.957,47	14.262.115,98	14.813.361,95
7. Impor	220.442.558,65	197.265.703,16	219.690.273,86
a. Antar Negara	115.206.621,00	82.054.713,52	101.762.230,00
b. Antar Provinsi	81.774.654,42	90.411.083,50	90.642.185,57
c. Jasa	23.461.283,22	24.799.906,14	27.285.858,29
Jumlah	633.283.483,36	689.841.314,34	770.660.505,05

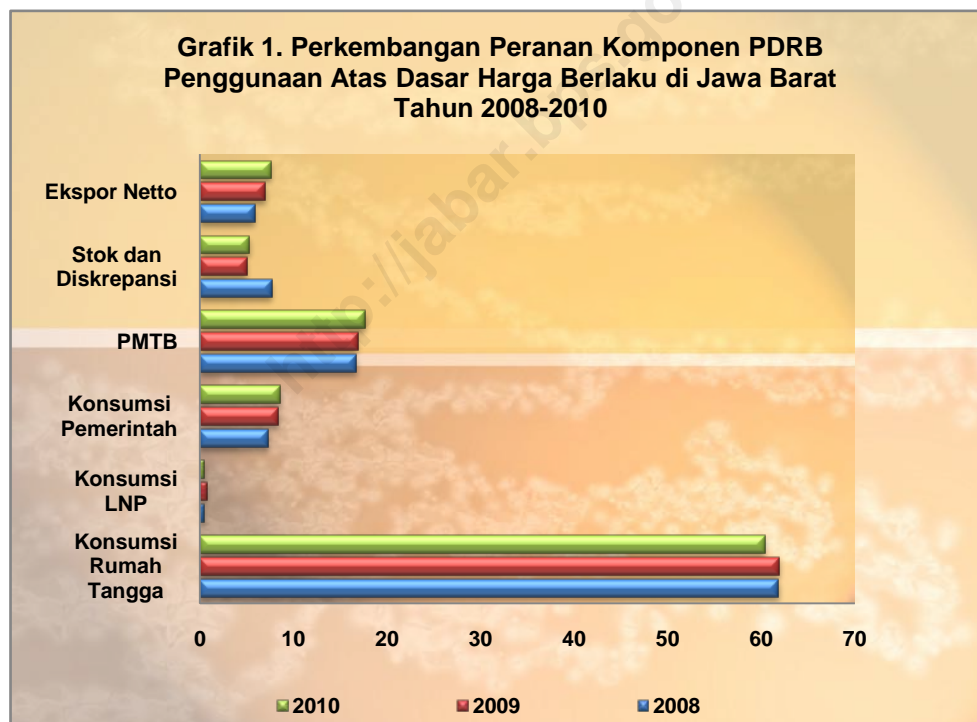
^{*)} Angka diperbaiki

^{**)} Angka sementara

Volume perekonomian Jawa Barat pada tahun 2010 yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat telah mencapai nilai Rp 770.660.505,05 juta dengan kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09 persen, setelah sempat melambat 4,19 persen pada tahun 2009 akibat imbas dari krisis global.

Sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dari sisi penggunaan selain investasi adalah konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga, lembaga non pemerintah dan

pengeluaran pemerintah serta selisih ekspor dan impor. Pada lima tahun terakhir konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi di atas 60 persen. Sejalan dengan itu, PDRB dari sisi penggunaan, andil terbesar pertumbuhan PDRB disumbangkan oleh komponen konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 2,93 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dan hal ini sebetulnya merupakan pasar yang potensial bagi pelaku usaha domestik maupun asing untuk melakukan kegiatan produksi di Jawa Barat. Sebagai tambahan, selama lima tahun terakhir kecenderungan konsumsi yang terbesar yaitu jenis makanan dengan rata-rata kontribusi diatas 53 persen, kemudian sisanya konsumsi non makanan.



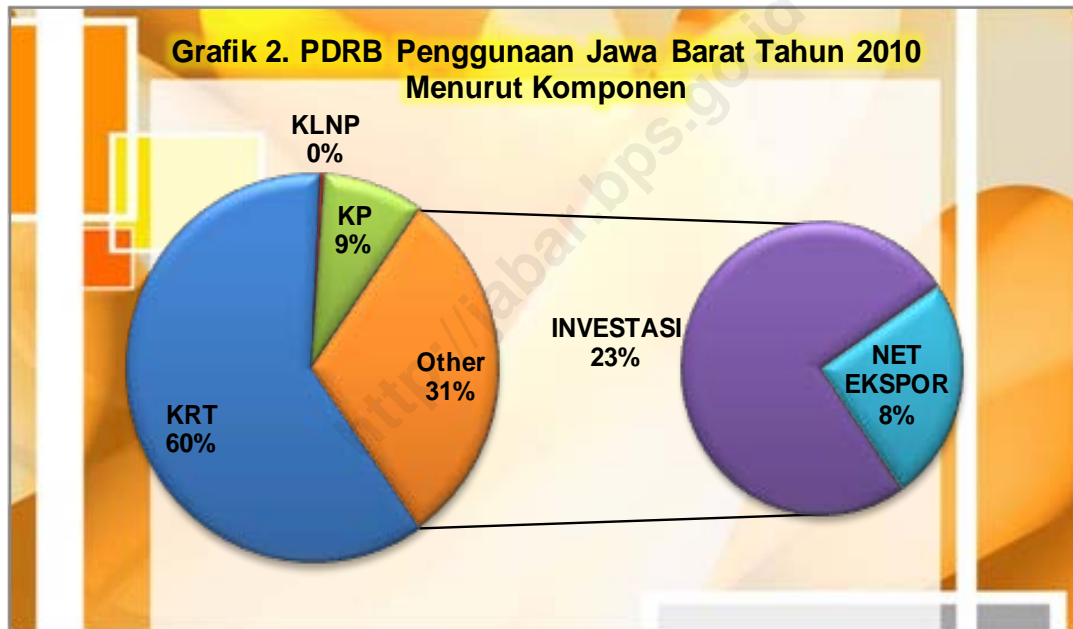
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Sementara kontribusi investasi, dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada periode lima tahun hanya berkisar 16-17 persen. Kontribusi investasi yang relatif kecil terhadap perekonomian juga menjadi salah satu penyebab

rendahnya kontribusi ekspor netto selama lima tahun terakhir, yaitu hanya berkisar 7 persen terhadap perekonomian, hal ini dapat dijelaskan karena investasi, terutama yang dilakukan oleh PMA, tentunya akan menghasilkan output dengan orientasi ekspor.

Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian Jawa Barat, dalam hal ini digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi penggunaan, disajikan seperti berikut ini.

3.1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga

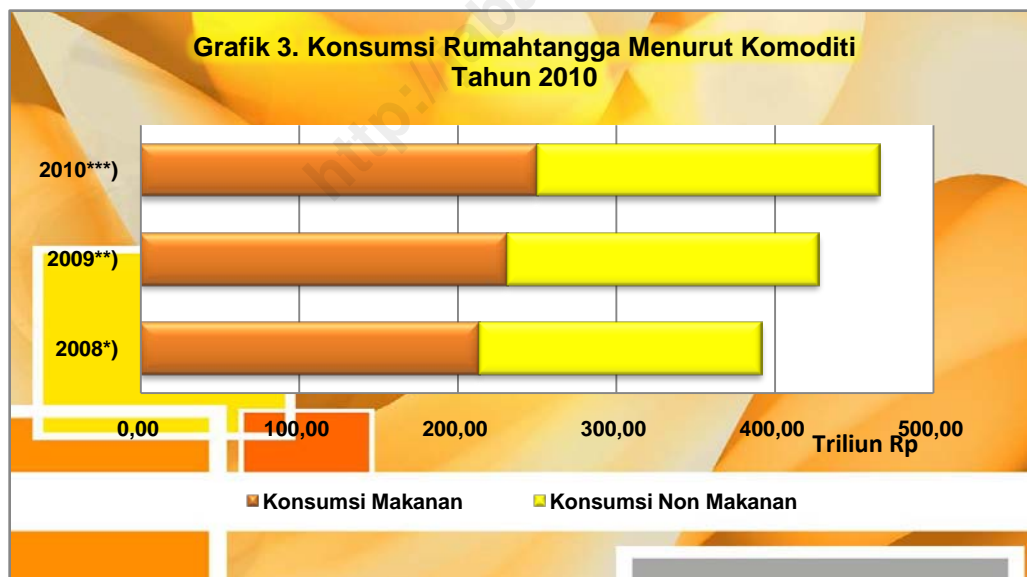


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2010, sebagian besar digunakan untuk Konsumsi yaitu mencapai 69 persen. Sedangkan yang digunakan untuk investasi hanya sebesar 23 persen dan sisanya sekitar 8 persen merupakan besaran perdagangan luar wilayah atau net ekspor. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih di *drive* oleh konsumsi, baik oleh rumah tangga,

lembaga non profit yang melayani rumahtangga maupun oleh pemerintah. Investasi yang menjadi target utama pengembangan perekonomian wilayah, dan idealnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, ternyata masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dan promosi ke beberapa negara penanam modal masih terus dilakukan demi meningkatnya peranan investasi baik investasi fisik maupun non fisik.

Komponen konsumsi terdiri dari konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga non profit dan konsumsi pemerintah. Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Barat pada periode tahun 2008-2010, dengan *share* mencapai 60 persen, merupakan komponen penyumbang terbesar. Sedangkan peranan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga tidak mencapai 1 persen, atau hanya sekitar 0,44 persen. Selanjutnya konsumsi pemerintah memberi sumbangan sebesar 9 persen terhadap PDRB Jawa Barat.

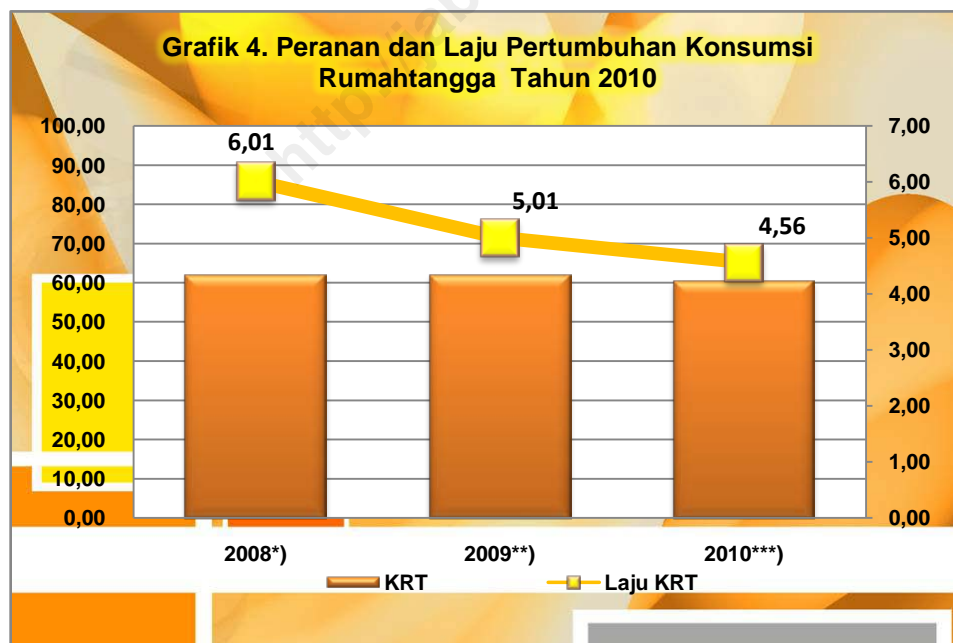


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Nilai konsumsi dari tahun 2008 sampai dengan 2010 selalu mengalami kenaikan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan harga barang dan

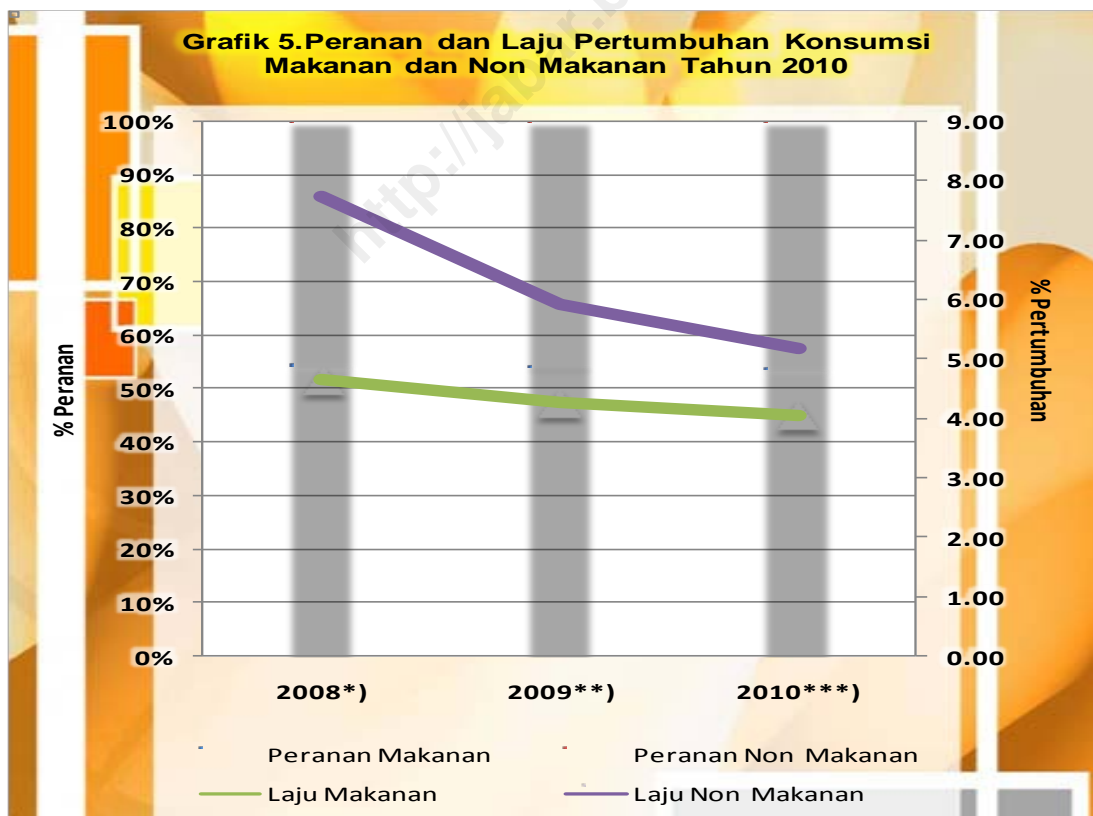
jasa dan besaran kuantitas konsumsi serta pertumbuhan dari sisi produksi atau pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2008 pengeluaran konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku tercatat Rp 391,68 triliun, di tahun 2009 meningkat menjadi Rp 427,64 triliun, dan pada tahun 2010 meningkat lagi hingga mencapai Rp. 465,38 triliun rupiah.

Peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2008 sebesar 61,85 persen, berturut-turut dalam kurun dua tahun berikutnya mengalami peningkatan pada tahun 2009 (61,99%) dan tahun 2010 (60,39%). Jika dilihat laju pertumbuhannya, konsumsi rumahtangga cenderung melambat sejalan dengan peranannya yang juga cenderung menurun dalam periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2008 laju pertumbuhannya sebesar 6,01 persen, sedikit melambat pada tahun 2009 menjadi 5,01 persen dan pada tahun 2010 lebih melambat lagi menjadi 4,56 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

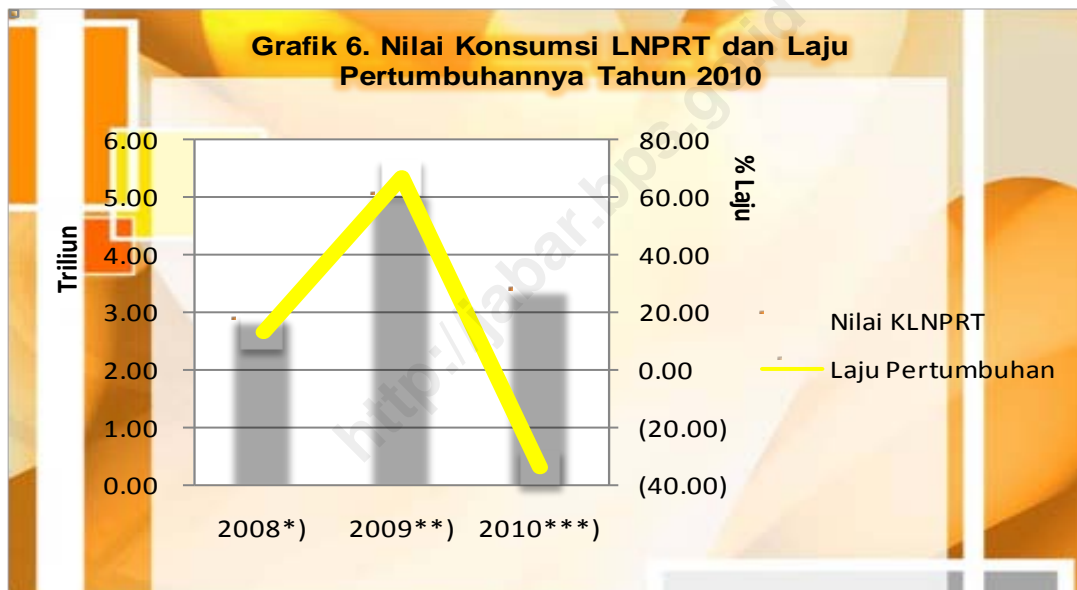
Proporsi konsumsi makanan terhadap total konsumsi cenderung menurun, pada tahun 2008 sebesar 54,53 persen, sedikit menurun pada tahun 2009 menjadi 54,06 persen dan pada tahun 2010 menurun menjadi 53,66 persen. Sebaliknya proporsi konsumsi non makanan terhadap total konsumsi semakin meningkat, pada tahun 2008 sebesar 45,47 persen, menurun menjadi 45,94 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar 46,34 persen. Baik laju pertumbuhan konsumsi makanan maupun non makanan selama periode tiga tahun terakhir semakin melambat. Laju pertumbuhan konsumsi makanan pada tahun 2008 sebesar 4,66 persen, melambat pada tahun 2009 menjadi 4,27 persen dan pada tahun 2010 sebesar 4,06 persen. Sedangkan laju pertumbuhan non makanan pada tahun 2008 meningkat sebesar 7,75 persen, pada tahun 2009 melambat menjadi 5,92 persen dan pada tahun 2010 melambat menjadi 5,18 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit

Bank Dunia mendefinisikan secara khusus *Non Government Organization (NGO)* atau kemudian juga diterjemahkan sebagai organisasi swasta yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian lembaga Non Profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Nilai konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) relatif sangat kecil, pada tahun 2008 sebesar Rp. 2,89 triliun kemudian meningkat signifikan mencapai hampir dua kali lipat pada tahun 2009 menjadi Rp. 5,1 triliun bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi nasional yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kemudian pada tahun 2010 kembali normal menjadi Rp. 3,38 triliun. Jika dilihat peranannya pada tahun 2008 sebesar 0,46 persen, meningkat

menjadi 0,73 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar 0,44 persen. Jika dilihat laju pertumbuhannya sangat fluktuatif, pada tahun 2008 meningkat 13,46 persen, pada tahun 2009 meningkat tajam mencapai 67,19 persen dan pada tahun 2010 menurun sebesar 33,96 persen.

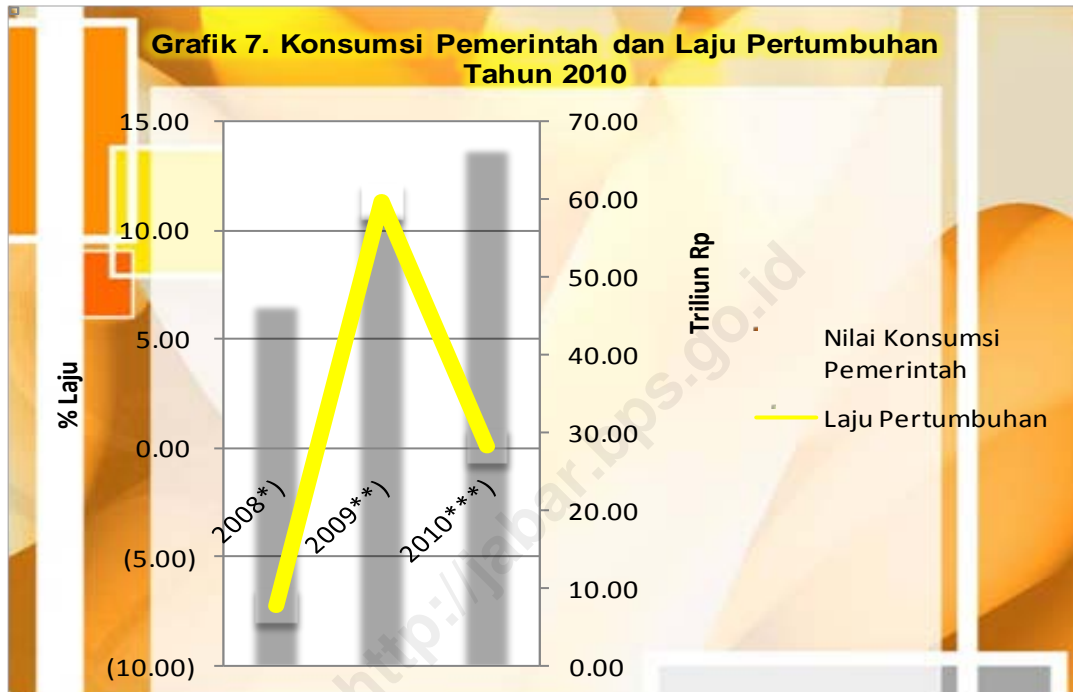
Pada umumnya lembaga ini selalu mendapat dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga donor internasional. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga ini namun perkembangannya belum mampu mendongkrak perkembangan ekonomi Jawa Barat secara agregat jika dibandingkan dengan komponen-komponen PDRB yang lain.

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi Pemerintah meliputi konsumsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (vertikal) nya di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa beserta perangkat dinas nya di masing-masing tingkat pemerintahan tersebut. Pengeluaran konsumsi Pemerintah tingkat provinsi mencakup konsumsi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, ditambah dengan konsumsi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari konsumsi Pemerintah Provinsi.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari pemerintah membutuhkan anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin pegawai dan keperluan pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta bantuan sosial

dan penerimaan dari barang dan jasa yang dijual. Peran yang dimiliki oleh pemerintah ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Jumlah pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu komponen penting dari PDRB, karena pengeluaran/belanja pemerintah bisa menjadi stimulus bagi perekonomian Jawa Barat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Kenaikan pengeluaran pemerintah dari tahun 2008 hingga tahun 2010 bertujuan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara nominal selalu semakin membesar dari tahun ke tahunnya sesuai dengan peningkatan pada APBD dan APBN. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 46,49 triliun, meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp. 58,17 triliun dan pada tahun 2010 menjadi Rp. 66,52 triliun. Kontribusi Konsumsi Pemerintah pada periode tersebut berkisar antara 7 persen sampai dengan 8 persen.

Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah secara riil menunjukkan kesamaan dimana pembiayaan pemerintah relatif stabil. Stabil dalam hal ini adalah proporsi penggunaan dari hasil wilayah dengan penggunaan yang bersumber dari luar wilayah berimbang. Besarnya laju konsumsi pemerintah secara riil pada tahun 2008 tercatat menurun sebesar -7,22 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 11,29 persen. Pada tahun 2010 lajunya mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,10 persen.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Salah satu komponen pengeluaran PDRB adalah Investasi. Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa-masa yang akan datang. Secara prinsip, investasi dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi non-finansial.

Investasi finansial lebih merupakan investasi dalam bentuk kepemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan surat berharga, obligasi, dan sejenisnya. Sedangkan investasi non-finansial merupakan investasi yang direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (investasi riil) yang berwujud kapital atau barang modal, termasuk di dalamnya inventori (persediaan). Meskipun demikian, investasi finansial pada suatu saat juga dapat direalisasikan sebagai investasi fisik.

Kapital diartikan sebagai berbagai bentuk barang modal seperti bangunan, mesin dan perlengkapannya, sarana atau alat transportasi, serta barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Pengertian lain dari kapital seperti yang dijelaskan dalam *system of National*

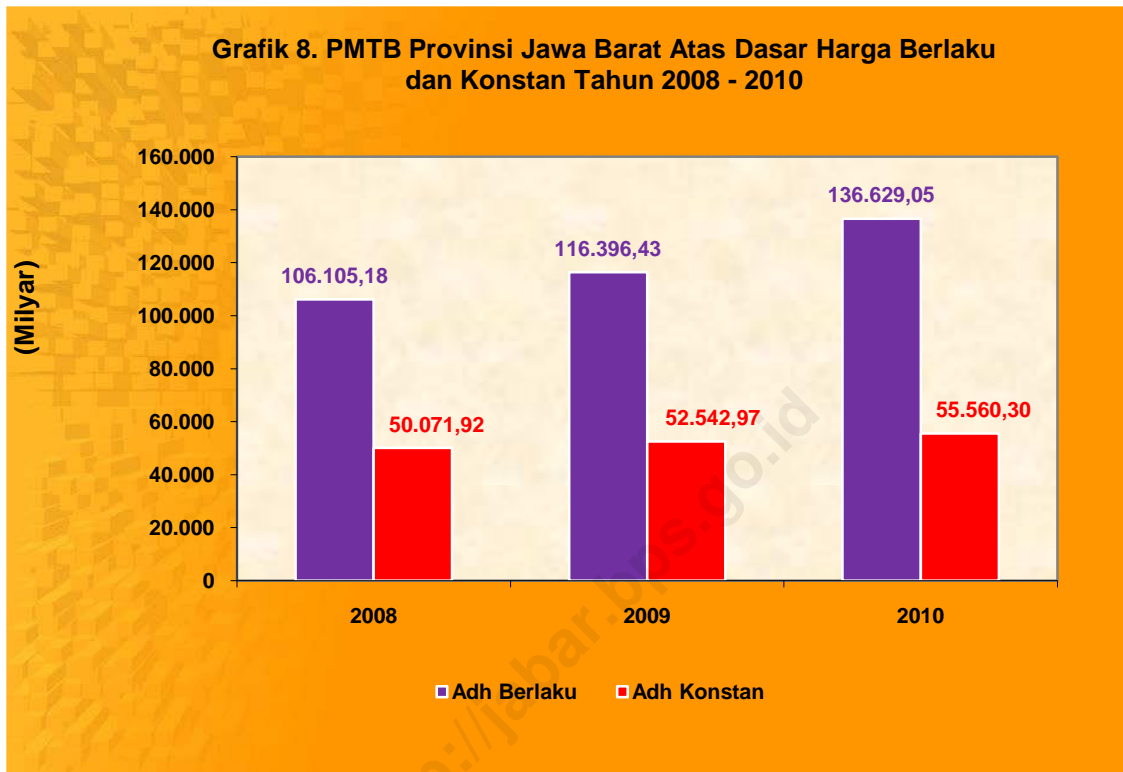
Accounts (SNA) adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Menurut SNA, PMTB identik dengan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). PMTB disebut sebagai “bruto” karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya.

Van den Berg (2001) mengemukakan bahwa investasi fisik memiliki eksternalitas positif yaitu suatu aktifitas yang memberikan dampak positif terhadap aktifitas atau individu lainnya. Eksternalitas positif tersebut dapat membantu perekonomian mengatasi *diminishing return* (suatu kondisi dimana setiap penambahan suatu input, dengan asumsi bahwa input yang lain adalah konstan, maka akan mengalami pertumbuhan output yang semakin menurun) dan *depreciation* (penyusutan).

Letak wilayah Jawa Barat yang merupakan daerah terdekat dengan Ibukota Jakarta memberikan suatu keuntungan tersendiri untuk menarik investor baik dari dalam negeri maupun manca negara. Demikian pula halnya dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan investasi. Salah satu prestasi yang mengesankan adalah ditetapkannya Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan beriklim investasi terbaik (*region champions*). Prestasi tersebut tentunya mampu memperbesar peluang untuk meningkatkan investasi di Wilayah Jawa Barat.

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan dari Rp. 106.105,18 milyar rupiah pada tahun 2008, naik menjadi Rp. 116.396,43 milyar rupiah tahun 2009, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 136.629,05 milyar rupiah pada tahun 2010. Sementara itu apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus

mengalami peningkatan laju pertumbuhan selama periode tiga tahun terakhir yaitu dari 4,77 persen pada tahun 2008, 4,94 persen tahun 2009, dan menjadi 5,74 persen pada tahun 2010.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

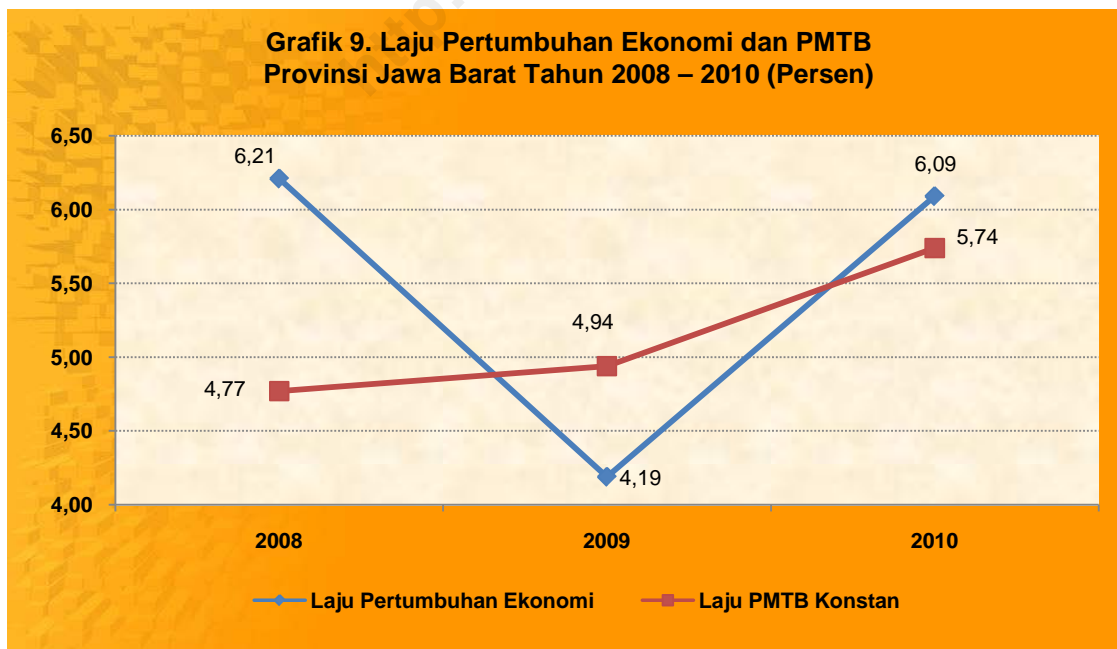
Apabila ditinjau dari kontribusinya, komponen PMTB selama periode 2008-2010 mempunyai peranan yang semakin meningkat terhadap total PDRB, yaitu 16,75 persen pada tahun 2008, 16,87 persen tahun 2009, dan menjadi 17,73 persen pada tahun 2010. Data tersebut menunjukkan bahwa investasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian di Jawa Barat.

Tabel 2.
PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB
dan *Source of Growth* PMTB Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2010

Uraian (1)	Tahun		
	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)
1. PDRB adh Berlaku (Miliar rupiah)	633.283,48	689.841,31	770.660,51
2. PMTB (Miliar rupiah)	106.105,18	116.396,43	136.629,05
Persentase PMTB terhadap total PDRB (persen)	16,75	16,87	17,73
<i>Source of Growth</i> PMTB	0,83	0,85	0,99

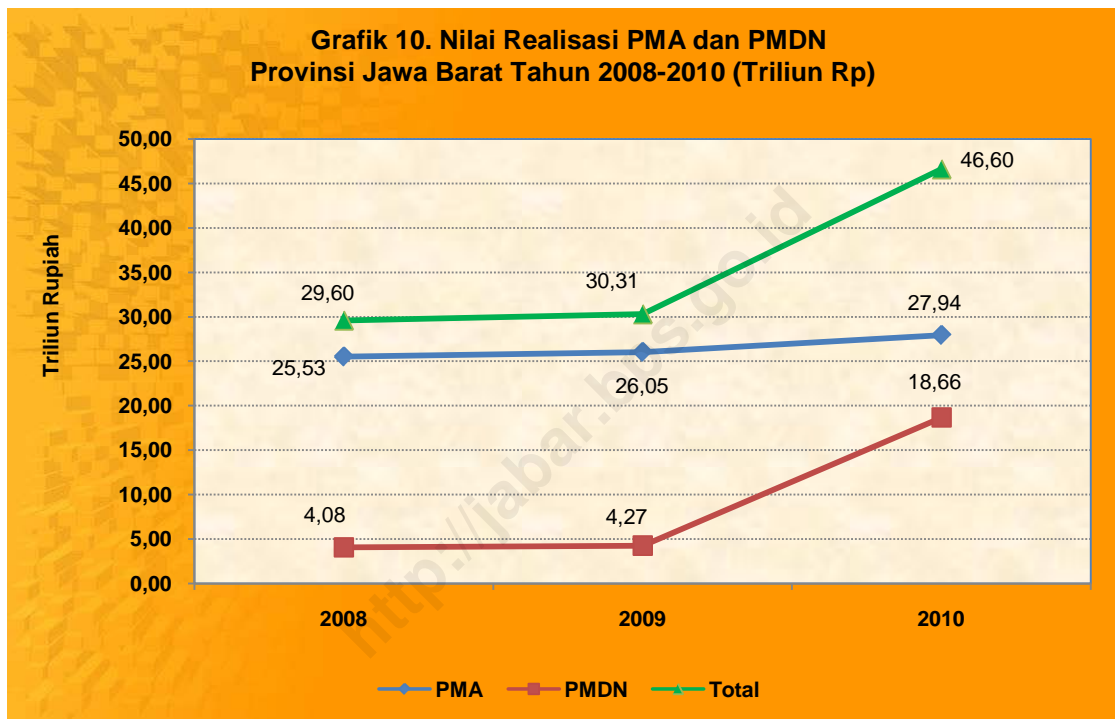
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Dari sisi sumber pertumbuhannya (*source of growth*), PMTB menyumbang laju pertumbuhan sebesar 0,83 persen poin dari 6,21 persen (2008); 0,85 persen poin dari 4,19 persen (2009); dan 0,99 persen poin dari 6,09 persen (2010). Sementara itu, Laju pertumbuhan PMTB selama periode 2008-2010 terus mengalami peningkatan dari 4,77 persen pada tahun 2008, menjadi 4,94 persen tahun 2009, dan meningkat kembali menjadi sebesar 5,74 persen pada tahun 2010.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Nilai realisasi investasi swasta melalui PMA dan PMDN selama periode Tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan. Nilai realisasi PMA meningkat dari Rp. 25,53 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 26,05 triliun pada tahun 2009 dan meningkat kembali menjadi Rp. 27,94 triliun pada tahun 2010. Sementara PMDN meningkat dari Rp. 4,08 triliun (2008) menjadi Rp. 4,27 triliun (2009) dan meningkat signifikan menjadi Rp. 18,66 triliun (2010).



Sumber: BPPMD Provinsi Jawa Barat

Perlu ditekankan bahwa PMTB tidak hanya mencakup investasi fisik (riil) institusi swasta, namun juga mencakup institusi rumah tangga dan pemerintah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan secara langsung antara PMTB dan investasi swasta PMA dan PMDN. Adapun Proporsi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2010 masih didominasi oleh bangunan dengan kontribusi sekitar 55 persen dari total PMTB, disusul kemudian mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

3.5. Inventori

Inventori merupakan salah satu pendukung utama dalam proses produksi. Tidak adanya kontrol terhadap inventori dapat menyebabkan berhentinya proses produksi. Di lain pihak semakin banyak penumpukan inventori akan mengakibatkan tingginya biaya inventori. Perubahan inventori dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan maupun penurunan dalam penggunaan bahan baku dan pelepasan barang-barang hasil produksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada dasarnya, fungsi inventori di bagi dalam dua bagian sebagai berikut :

- a. Inventori dalam bentuk bahan baku, bahan jadi, bahan setengah jadi serta bahan penolong. Inventori ini sangat diperlukan tujuannya adalah untuk mengamankan proses produksi selama jangka waktu tertentu.
- b. Inventori yang merupakan sisa produksi yang belum terjual. Dalam ekonomi makro, inventori ini mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan, tetapi pada ekonomi mikro, inventori ini diperlukan dan harus dijaga keberadaannya hal ini untuk menghindari kelangkaan barang yang akan berdampak pada kenaikan harga.

Tabel 3.
Laju dan Peranan Inventori Terhadap
PDRB Jawa Barat Tahun 2008-2010

Tahun	Laju Inventori	Peranan Inventori (%)
(1)	(2)	(3)
2008	28,21	4,48
2009	40,84	1,29
2010	3,45	1,30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan inventori selama tahun 2008-2009 namun kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2010. Pada posisi tahun 2008, laju inventori adalah sebesar 28,21 persen kemudian

meningkat sebesar 40,84 persen tahun 2009 dan melambat menjadi hanya sebesar 3,45 persen pada tahun 2010. Sementara itu apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB selama periode 2009-2010, rata-rata peranan inventori adalah sebesar 1,30 persen.

3.6. Ekspor dan Impor

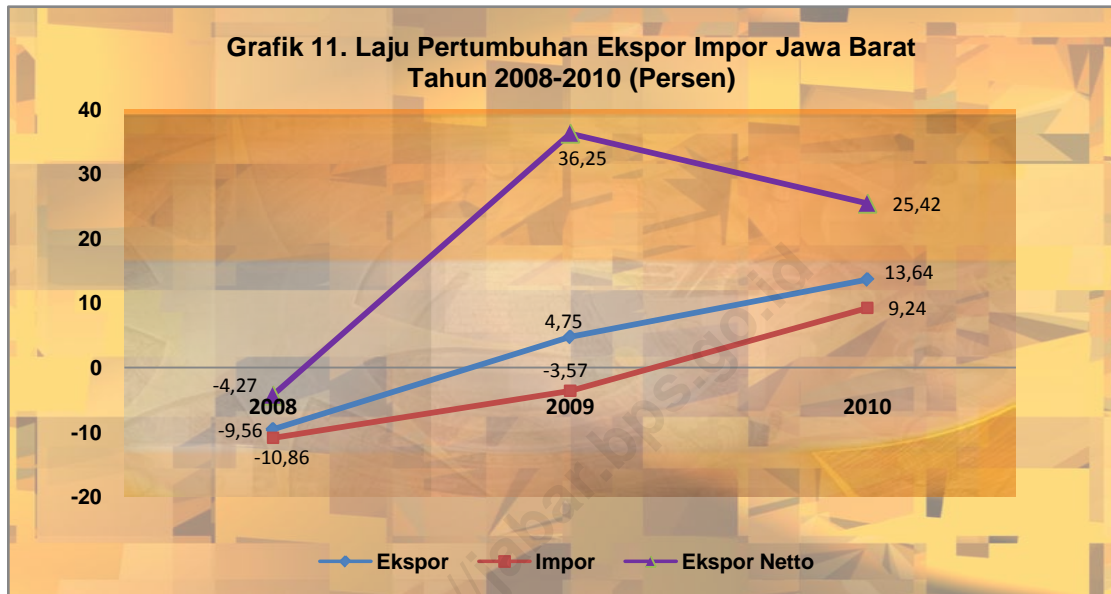
Kerjasama perdagangan internasional antar negara baik bilateral maupun multilateral mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Kerjasama internasional khususnya dalam bidang perdagangan yaitu dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan global.

Tidak dapat dipungkiri dampak yang dirasakan dari liberalisasi perdagangan yaitu terbukanya keran impor untuk berbagai jenis barang dan jasa. Antisipasi terhadap liberalisasi perdagangan diperlukan guna menghindari efek negatif yang mungkin terjadi terhadap perekonomian nasional. Kebijakan dan strategi perdagangan yang tepat dengan mengidentifikasi struktur perdagangan khususnya di Jawa Barat sangat penting untuk menentukan langkah strategis yang harus ditempuh.

Sadono Sukirno mengidentifikasi empat benefit dari aktivitas perdagangan yaitu:

1. Memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
4. Transfer teknologi modern. Hal di atas menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan internasional turut memberikan andil dalam peningkatan nilai tambah dalam perekonomian suatu wilayah.

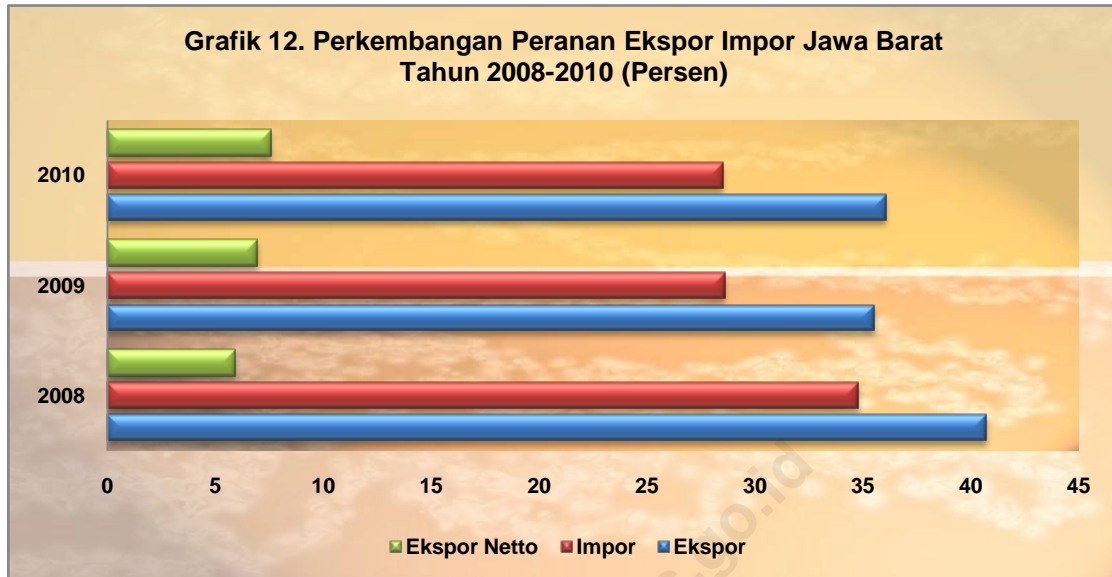
Jika ditinjau dari letak geografis Provinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibukota negara sebagai pusat berbagai aktivitas. Hal ini memungkinkan wilayah Jawa Barat menjadi penyangga utama terutama berbagai aktivitas perekonomian. Faktor ini menjadi penyebab pesatnya lalu lintas transaksi perdagangan barang dan jasa antara kedua wilayah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Perkembangan ekspor dan impor di wilayah Jawa Barat menunjukkan tendensi yang meningkat selama tiga tahun terakhir yaitu pada kurun tahun 2008-2010 dengan cakupan perdagangan luar negeri dan antar wilayah. Hal ini dapat diidentifikasi dari pertumbuhan ekspor netto yang terjadi pada tahun 2009 sebesar 36,25 setelah pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 4,27 persen, kemudian memasuki tahun 2010 kembali mengalami pertumbuhan meski melambat sebesar 25,42 persen. Sementara, dari segi peranannya dalam perekonomian Jawa Barat, selama tiga tahun 2008-2010 ekspor netto memiliki pola yang semakin meningkat dengan rata-rata peningkatan peranan selama dua periode sebesar 0,8

persen. Tercatat nilai ekspor pada tahun 2010 telah mencapai Rp (Juta) 278,076,250.41

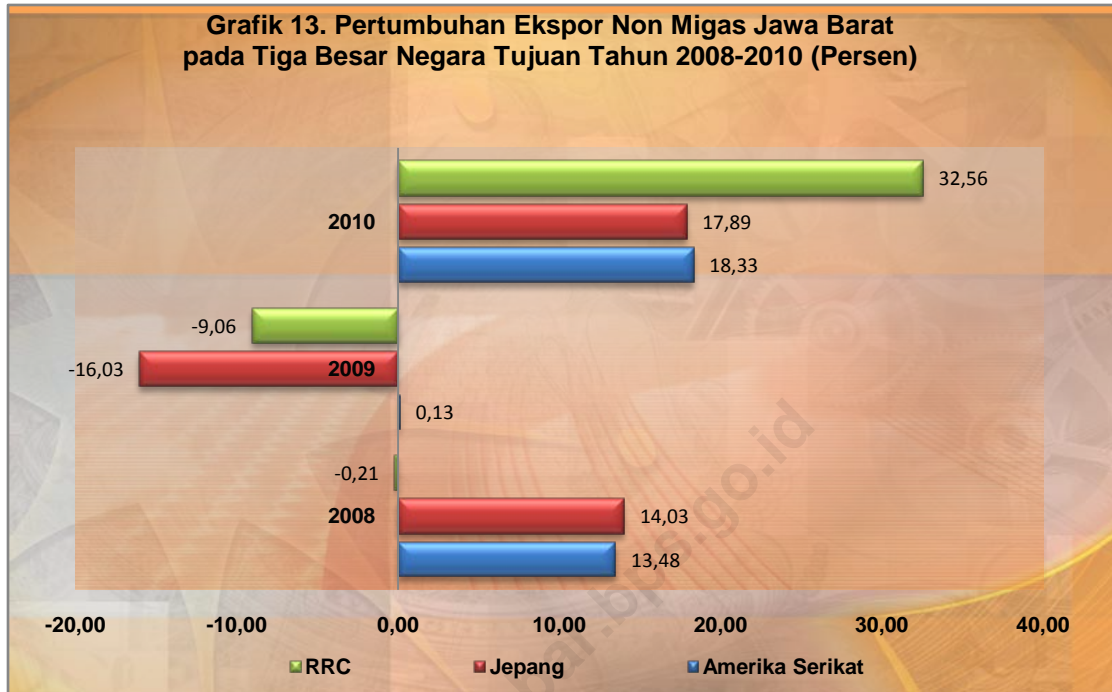


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Dalam kurun tiga tahun terakhir (2008-2010) kontribusi ekspor terhadap perekonomian Jawa Barat mengalami *trend* yang semakin mengecil seperti yang terlihat dalam tabel di atas. Pada tahun 2008 ekspor masih memiliki kontribusi sebesar 40,71 persen namun pada tahun 2009 kontribusi ekspor berkurang signifikan yaitu sebesar 5,16 persen. Meski demikian, pada tahun 2010 kontribusi ekspor Jawa Barat kembali meningkat tipis sebesar 0,53 persen, seiring dengan memulihnya perekonomian global.

Pengaruh krisis global pada tahun 2008 turut berimbas pada ekspor dan impor Jawa Barat yang mengalami penurunan akibat melemahnya *demand* dari tiga besar negara tujuan ekspor Jawa Barat yaitu Amerika Serikat, Jepang dan China. Hal ini dapat dijelaskan yaitu pada tahun 2009 penurunan ekspor yang signifikan terjadi di Jepang sebesar 16,03 persen dan RRC sebesar 9,06 persen. Pertumbuhan ekspor dari Amerika Serikat mengalami perlambatan sebesar 0,13 persen seperti yang

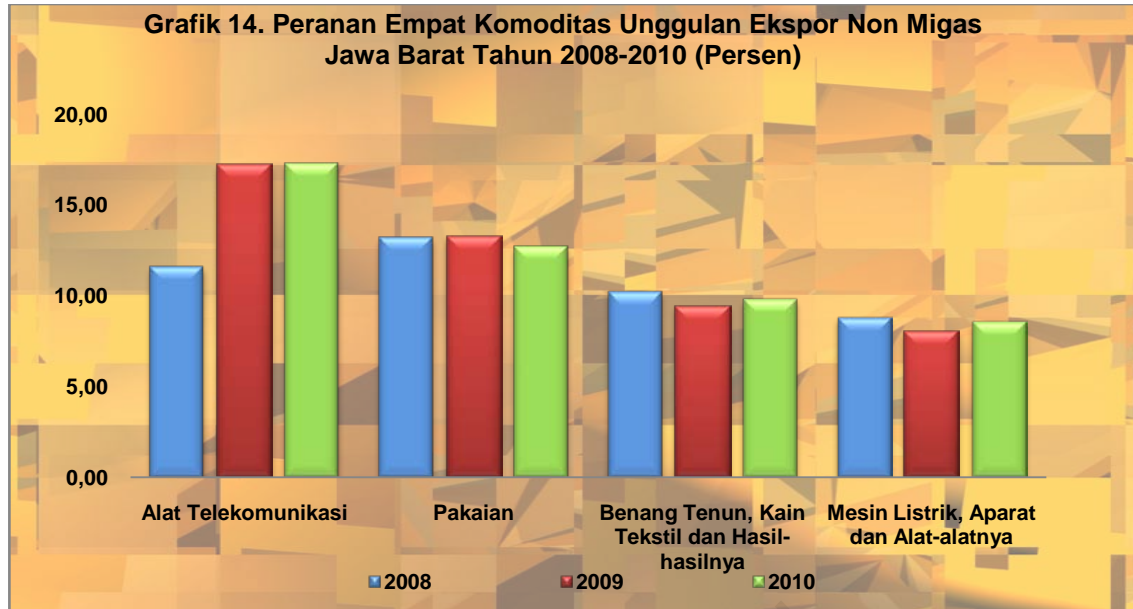
terlihat dalam grafik. Meski demikian, pada tahun 2010 pertumbuhan kembali terjadi di ketiga negara tersebut seiring dengan pulihnya negara-negara tersebut dari krisis global seperti terlihat dalam grafik.



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Sementara itu ditinjau dari komposisinya, ekspor Jawa Barat didominasi oleh ekspor antar negara disusul oleh ekspor antar provinsi dan terakhir ekspor jasa. Banyaknya jumlah industri manufaktur di Jawa Barat terutama yang berorientasi ekspor turut memberikan andil terhadap tingginya kontribusi ekspor antar negara dan antar provinsi bagi perekonomian Jawa Barat.

Tercatat menurut data IBS (Industri Besar dan Sedang) pada tahun 2008, industri besar dan sedang di Pulau Jawa memberikan kontribusi yang signifikan yaitu mencapai 82,54 persen. Penentuan komposisi ekspor dilakukan sebagai strategi untuk mengetahui komponen ekspor yang dapat didorong pertumbuhannya untuk meningkatkan kinerja ekspor yang lebih baik.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Pada Grafik diatas dapat dilihat peranan komoditas unggulan ekspor Jawa Barat berdasarkan nilai ekspor terbesar selama kurun tahun 2008-2010. Komoditas-komoditas tersebut selama tiga tahun berturut-turut stabil dalam posisi empat besar ekspor non migas Jawa Barat yaitu Alat Telekomunikasi, Pakaian, Benang Tenun, Kain Tekstil dan hasil-hasilnya, Mesin Listrik, Aparat dan Alat-alatnya. Fakta lainnya yang harus dicermati adalah empat komoditas tersebut memiliki peranan terbesar selama kurun tahun 2008-2010. Meski demikian, sebagai pengaruh krisis global untuk komoditas benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya serta mesin listrik pada tahun 2009 mengalami penurunan peranan masing-masing sebesar 9,45 persen dan 8,04 persen. Sementara itu komoditas impor utama Jawa Barat selama tahun 2008-2010 didominasi oleh Mesin, Listrik, Aparat dan Alat-alatnya, Alat Telekomunikasi, Barang Tenun, Kain Tekstil dan Hasilnya dan Kendaraan Bermotor untuk Jalan Raya.

3.7. Sumber Laju Pertumbuhan (*Source of Growth/SOG*)

Peranan masing-masing komponen PDRB terhadap total laju pertumbuhan PDRB (LPE) diidentifikasi sebagai sumber laju pertumbuhan (SOG). Tercatat pada tahun 2010 komponen yang memiliki peranan positif bagi LPE total adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), inventori, ekspor dan impor, sedangkan yang memberikan peran negatif hanya komponen konsumsi lembaga non pemerintah.

Selama tiga tahun berturut-turut (2008-2010), konsumsi rumah tangga memberikan andil positif dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Hal ini disebabkan peranannya terhadap total PDRB merupakan yang terbesar. Tercatat pada tahun 2008-2009, konsumsi rumahtangga memiliki andil terbesar seperti yang terlihat dalam tabel. Demikian pula halnya pada tahun 2010, dimana andil pertumbuhan komponen ini masih yang terbesar yaitu sebesar 2,93 persen. Besaran andil konsumsi rumahtangga tersebut berbeda tipis dengan andil ekspor netto (ekspor minus impor) yaitu sebesar 2,90 persen.

Andil konsumsi lembaga non profit selama tiga tahun (2008-2010) menunjukkan *trend* yang berfluktuasi, tercatat pada tahun 2008-2009 komponen ini masih memberikan andil positif meski besarnya sangat kecil dibandingkan komponen PDRB lainnya seperti yang terlihat dalam tabel, meski demikian pada tahun 2010 komponen ini memiliki andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yaitu sebesar 0,30 persen.

Selama tiga tahun (2008-2010), andil konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada tahun 2008, komponen ini memberikan andil negatif sebesar 0,48 persen kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,65 persen dan merupakan

andil terbesar selama tiga tahun terakhir. Andil komponen ini pada tahun 2010 mengecil menjadi sebesar 0,01 persen.

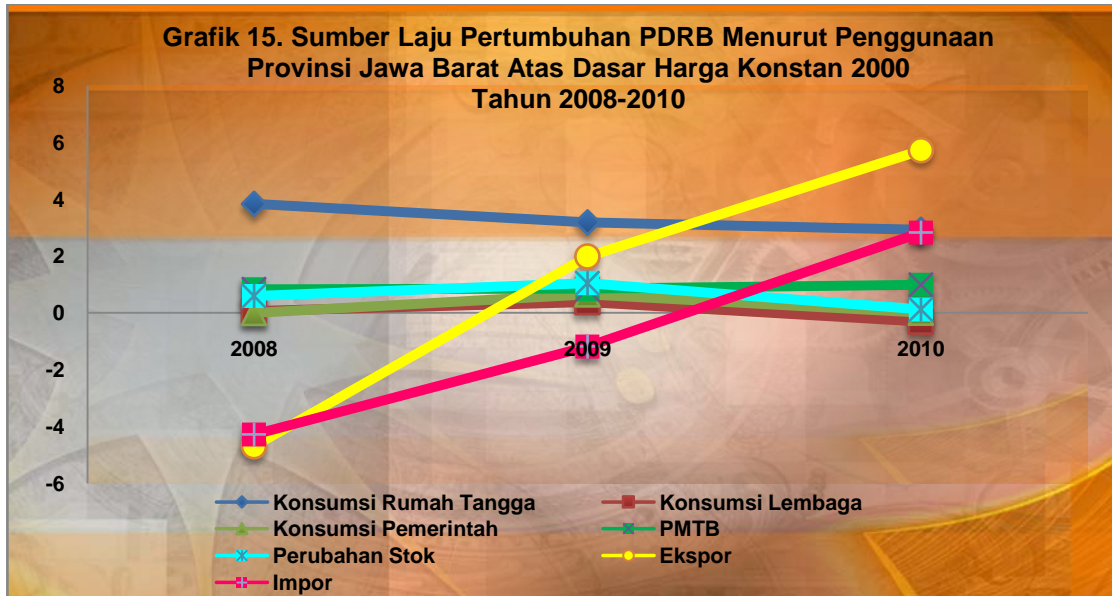
Tabel 4.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga konstan 2000 Tahun 2008-2010

Uraian	2008*)	2009**)	2010***)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.84	3.19	2.93
2. Konsumsi Lembaga	0.07	0.38	-0.3
3. Konsumsi Pemerintah	-0.48	0.65	0.01
4. PMTB	0.83	0.85	0.99
5. Perubahan Stok	0.6	1.05	0.12
6. Ekspor	-4.69	1.99	5.73
7. Impor	-4.28	-1.18	2.83
Jumlah	6.21	4.19	6.09

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Andil komponen PMTB selama tiga tahun (2008-2010) dalam LPE menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini merupakan preseden yang baik karena komponen investasi memiliki eksistensi yang terus meningkat bagi perekonomian Jawa Barat. Tercatat pada tahun 2010 komponen ini memberikan andil sebesar 0,99 persen, atau merupakan andil ketiga terbesar setelah konsumsi pemerintah dan ekspor netto.

Sementara itu, komponen inventori memberikan andil positif selama kurun tiga tahun, tercatat pada tahun 2008 sebesar 0,60 persen kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 1,05 persen dan mengecil menjadi 0,12 persen pada tahun 2010.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Selama kurun tiga tahun (2008-2010) andil komponen ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki *trend* yang semakin meningkat. Hal ini merupakan preseden yang baik bagi perekonomian Jawa Barat karena devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Setelah memberikan andil negatif pada tahun 2008 sebesar 4,69 persen, kemudian pada tahun 2009 andil ekspor menjadi positif yaitu sebesar 1,99 persen, kemudian peranannya terus melesat pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,73 persen.

Sementara itu komponen impor merupakan faktor pengurang ekonomi, maka andil negatif berarti mendukung LPE total. Pada tahun 2008 komponen ini memberikan andil negatif sebesar 4,28 persen, sama halnya tahun 2009 komponen ini masih memberikan andil negatif yaitu sebesar 1,18 persen. Meski demikian pada tahun 2010 komponen ini memberikan andil positif sebesar 2,83 persen.

3.8. Kesimpulan

Volume perekonomian Jawa Barat pada tahun 2010 yang dicerminkan oleh dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat telah mencapai nilai Rp 770.660.505,05 juta dengan kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09 persen, setelah sempat melambat 4,19 persen pada tahun 2009 akibat imbas dari krisis global.

Konsumsi rumah tangga yang selama ini sangat mempengaruhi perekonomian Jawa Barat dari sisi permintaan, masih memperlihatkan dominasi terhadap PDRB. Meskipun mengalami sedikit penurunan kontribusi dari 61,99 persen pada tahun 2009 menjadi 60,39 persen pada tahun 2010, namun peranan komponen tersebut selama kurun 2008 – 2010 masih di atas 60 persen. Nilai konsumsi dari tahun 2008 sampai dengan 2010 selalu mengalami kenaikan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan harga barang dan jasa, dan besaran kuantitas konsumsi yaitu Rp. 391,68 triliun pada tahun 2008, Rp. 427,64 triliun pada tahun 2009 kemudian Rp. 465,38 triliun pada tahun 2010.

Nilai konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPR) relatif sangat kecil, pada tahun 2008 sebesar Rp. 2,89 triliun kemudian meningkat signifikan mencapai hampir dua kali lipat pada tahun 2009 menjadi Rp. 5,1 triliun bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi nasional yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kemudian pada tahun 2010 kembali normal menjadi Rp. 3,38 triliun. Peranan komponen tersebut pada tahun 2008 sebesar 0,46 persen, meningkat menjadi 0,73 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar 0,44 persen. Jika dilihat laju pertumbuhannya sangat fluktuatif, pada tahun 2008 meningkat 13,46 persen, pada tahun 2009 meningkat tajam mencapai 67,19 persen dan pada tahun 2010 menurun sebesar 33,96 persen.

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan dari Rp. 106.105,18 milyar rupiah pada tahun 2008, naik menjadi Rp. 116.396,43 milyar rupiah tahun 2009, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 136.629,05 milyar rupiah pada tahun 2010. Sementara itu apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan selama periode tiga tahun terakhir yaitu dari 4,77 persen pada tahun 2008, 4,94 persen tahun 2009, dan menjadi 5,74 persen pada tahun 2010. Proporsi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2010 masih didominasi oleh bangunan dengan kontribusi sebesar 55 persen dari total PMTB, disusul kemudian mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

Terjadi peningkatan laju pertumbuhan inventori selama tahun 2008-2009 namun kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2010. Pada posisi tahun 2008, laju inventori adalah sebesar 28,21 persen kemudian meningkat sebesar 40,84 persen tahun 2009 dan melambat menjadi hanya sebesar 3,45 persen pada tahun 2010. Sementara itu apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB selama periode 2008-2010, rata-rata peranan inventori adalah sebesar 3,62 persen.

Ekspor impor Jawa Barat terbagi menjadi ekspor impor barang antar negara, ekspor impor barang antar daerah dan ekspor impor jasa. Secara total pada kurun waktu yang sama Jawa Barat selalu mengalami net ekspor yang positif atau dengan kata lain ekspor dari Jawa Barat melebihi impornya.

Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Juta Rupiah)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	391,682,855.88	427,641,859.65	465,383,669.48
a. Makanan	213,577,113.97	231,172,548.62	249,728,584.80
b. Bukan Makanan	178,105,741.91	196,469,311.04	215,655,084.68
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	2,891,650.29	5,055,740.39	3,385,128.51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46,487,316.51	58,172,553.50	66,516,281.58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	106,105,180.73	116,396,431.43	136,629,046.85
5. Inventori	20,359,959.66	25,692,478.21	30,343,120.03
Diskrepansi	28,383,975.70	8,929,474.51	10,017,282.06
6. Ekspor :	257,815,103.24	245,218,479.81	278,076,250.41
a. Antar Negara	186,636,120.21	188,561,917.50	215,565,319.01
b. Antar Provinsi	56,407,025.56	42,394,446.32	47,697,569.45
c. Jasa	14,771,957.47	14,262,115.98	14,813,361.95
7. Impor :	220,442,558.65	197,265,703.16	219,690,273.86
a. Antar Negara	115,206,621.00	82,054,713.52	101,762,230.00
b. Antar Provinsi	81,774,654.42	90,411,083.50	90,642,185.57
c. Jasa	23,461,283.22	24,799,906.14	27,285,858.29
P D R B	633,283,483.36	689,841,314.34	770,660,505.05

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Juta Rupiah)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	185,765,943.78	195,064,726.14	203,968,382.74
a. Makanan	103,075,082.21	107,474,795.82	111,840,301.09
b. Bukan Makanan	82,690,861.57	87,589,930.33	92,128,081.65
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	1,626,633.24	2,719,519.33	1,796,077.43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,806,449.08	18,703,600.03	18,721,404.54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,071,918.83	52,542,970.59	55,560,297.78
5. Inventori	7,452,741.47	10,496,654.99	10,858,526.86
Diskrepansi	4,051,258.94	(10,770,851.41)	(12,486,479.09)
6. Ekspor :	121,796,474.21	127,577,573.34	144,977,705.84
a. Antar Negara	87,780,851.36	106,110,106.33	121,017,119.99
b. Antar Provinsi	26,206,238.15	14,922,382.92	17,997,258.04
c. Jasa	7,809,384.70	6,545,084.09	5,963,327.82
7. Impor :	96,365,582.85	92,928,942.51	101,520,074.63
a. Antar Negara	48,317,012.49	37,916,151.51	46,278,891.62
b. Antar Provinsi	35,799,520.56	43,338,230.29	42,520,359.48
c. Jasa	12,249,049.81	11,674,560.71	12,720,823.54
P D R B	291,205,836.70	303,405,250.50	321,875,841.47

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 3.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61.85	61.99	60.39
a. Makanan	33.73	33.51	32.40
b. Bukan Makanan	28.12	28.48	27.98
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.46	0.73	0.44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.34	8.43	8.63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.75	16.87	17.73
5. Inventori	3.21	3.72	3.94
Diskrepansi	4.48	1.29	1.30
6. Ekspor :	40.71	35.55	36.08
a. Antar Negara	29.47	27.33	27.97
b. Antar Provinsi	8.91	6.15	6.19
c. Jasa	2.33	2.07	1.92
7. Impor :	34.81	28.60	28.51
a. Antar Negara	18.19	11.89	13.20
b. Antar Provinsi	12.91	13.11	11.76
c. Jasa	3.70	3.60	3.54
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 4.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63.79	64.29	63.37
a. Makanan	35.40	35.42	34.75
b. Bukan Makanan	28.40	28.87	28.62
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.56	0.90	0.56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.77	6.16	5.82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.19	17.32	17.26
5. Inventori	2.56	3.46	3.37
Diskrepansi	1.39	(3.55)	(3.88)
6. Ekspor :	41.82	42.05	45.04
a. Antar Negara	30.14	34.97	37.60
b. Antar Provinsi	9.00	29.80	28.16
c. Jasa	2.68	2.16	1.85
7. Impor :	33.09	30.63	31.54
a. Antar Negara	16.59	12.50	14.38
b. Antar Provinsi	12.29	14.28	13.21
c. Jasa	4.21	3.85	3.95
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.41	9.18	8.83
a. Makanan	14.17	8.24	8.03
b. Bukan Makanan	16.93	10.31	9.77
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	23.29	74.84	(33.04)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.66	25.14	14.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.26	9.70	17.38
5. Inventori	11.50	26.19	18.10
Diskrepansi	(610.75)	(68.54)	12.18
6. Ekspor :	11.39	(4.89)	13.40
a. Antar Negara	19.37	1.03	14.32
b. Antar Provinsi	(8.36)	(24.84)	12.51
c. Jasa	9.13	(3.45)	3.87
7. Impor :	19.32	(10.51)	11.37
a. Antar Negara	50.73	(28.78)	24.02
b. Antar Provinsi	(3.89)	10.56	0.26
c. Jasa	0.97	5.71	10.02
P D R B	20.35	8.93	11.72

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 6.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.01	5.01	4.56
a. Makanan	4.66	4.27	4.06
b. Bukan Makanan	7.75	5.92	5.18
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	13.46	67.19	(33.96)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(7.22)	11.29	0.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.77	4.94	5.74
5. Inventori	28.21	40.84	3.45
Diskrepansi	(628.74)	(365.86)	15.93
6. Ekspor :	(9.56)	4.75	13.64
a. Antar Negara	(6.54)	20.88	14.05
b. Antar Provinsi	(16.90)	(43.06)	20.61
c. Jasa	(15.16)	(16.19)	(8.89)
7. Impor :	(10.86)	(3.57)	9.24
a. Antar Negara	17.23	(21.53)	22.06
b. Antar Provinsi	(32.38)	21.06	(1.89)
c. Jasa	(12.15)	(4.69)	8.96
P D R B	6.21	4.19	6.09

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 7.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan Tahun 2008-2010 (Tahun 2000 = 100,00)
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	210.85	219.23	228.16
a. Makanan	207.21	215.09	223.29
b. Bukan Makanan	215.39	224.31	234.08
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	177.77	185.91	188.47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	276.60	311.02	355.30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	211.91	221.53	245.91
5. Inventori	273.19	244.77	279.44
Diskrepansi	700.62	(82.90)	(80.23)
6. Ekspor :	211.68	192.21	191.81
a. Antar Negara	212.62	177.70	178.13
b. Antar Provinsi	215.24	284.10	265.03
c. Jasa	189.16	217.91	248.41
7. Impor :	228.76	212.28	216.40
a. Antar Negara	238.44	216.41	219.89
b. Antar Provinsi	228.42	208.62	213.17
c. Jasa	191.54	212.43	214.50
P D R B	217.47	227.37	239.43

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 8.
Inflasi Tahun 2008-2010
(Persen)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.86	3.98	4.08
a. Makanan	9.09	3.81	3.81
b. Bukan Makanan	8.51	4.14	4.36
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	8.67	4.58	1.38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33.28	12.44	14.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.74	4.54	11.01
5. Inventori	(13.03)	(10.40)	14.17
Diskrepansi	(3.40)	(111.83)	(3.23)
6. Ekspor :	23.16	(9.20)	(0.21)
a. Antar Negara	27.72	(16.42)	0.24
b. Antar Provinsi	10.27	31.99	(6.71)
c. Jasa	28.63	15.20	14.00
7. Impor :	33.85	(7.20)	1.94
a. Antar Negara	28.58	(9.24)	1.61
b. Antar Provinsi	42.13	(8.67)	2.18
c. Jasa	14.94	10.91	0.97
P D R B	13.31	4.55	5.30

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 9.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2010 (jutaan rupiah)

Uraian	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.84	3.19	2.93
a. Makanan	1.67	1.51	1.44
b. Bukan Makanan	2.17	1.68	1.50
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.07	0.38	(0.30)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0.48)	0.65	0.01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.83	0.85	0.99
5. Inventori	0.60	1.05	0.12
Diskrepansi	1.76	(5.09)	(0.57)
6. Ekspor :	(4.69)	1.99	5.73
a. Antar Negara	(2.24)	6.29	4.91
b. Antar Provinsi	(1.94)	(3.87)	6.14
c. Jasa	(0.51)	(0.43)	(0.19)
7. Impor :	(4.28)	(1.18)	2.83
a. Antar Negara	2.59	(3.57)	2.76
b. Antar Provinsi	(6.25)	2.59	(0.27)
c. Jasa	(0.62)	(0.20)	0.34
P D R B	6.21	4.19	6.09

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

DATA MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 43 Telp. (022)7272595 – 701696

Fax (022) 7213572 Bandung 40124. E-mail : bps3200@mailhost.bps.go.id

Home Page <http://jabar.bps.go.id>